



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

“Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan”

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 serta dasar operasionalisasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 maka diharapkan kepada seluruh aparatur dalam lingkungan Dinas Kehutanan dapat melaksanakannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan tanggung jawab yang harus dilakukan sebagaimana telah dicanangkan dalam visi Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Januari 2026



KEPALA DINAS,

Drs. H. KOIMUDIN, S.H.,M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19691208 199603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
 Bab I. PENDAHULUAN	 1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan	4
1.4.Sistematika Penulisan	5
 Bab II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 6
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	53
 Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 55
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	55
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	56
3.3. Program dan Kegiatan	58
 Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 72
 Bab V. PENUTUP	 83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	7
Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	27
Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan	41
Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan	54
Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Sumatera Selatan	61
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026	76

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, sehingga dalam penyusunannya Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program-program strategis perangkat daerah pada tahun pertama yang termuat dalam Dokumen RKPD. Selain berpedoman pada RKPD, Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam penyusunannya, Renja perangkat daerah tidak hanya berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, Renja perangkat daerah juga harus memperhatikan Renja kementerian/lembaga dan Renja Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan untuk periode satu tahun dalam rencana kerja kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan dalam dokumen Renja Provinsi atau Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan agar adanya penyelarasan

program dan kegiatan strategis perangkat daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk periode satu tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan

Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

20. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 872/Kpts/Bappeda/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyediakan tolak ukur pelaksanaan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan untuk periode satu tahun yaitu tahun 2026 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan bidang kehutanan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah:

1. Menjabarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 kedalam rencana pembangunan tahunan.
2. Menyediakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan

perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah dan program dan kegiatan.

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2025 sebanyak 7 subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil, 24 subkegiatan yang memenuhi target kinerja dan 13 subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tabel T-C.29 di bawah ini:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Lembar : 1 dari 10

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
3.28.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat; Akuntabilitas Kinerja PD Daerah	100%; 86/A							
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun	100%							
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	20 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100	10 Laporan	13 Laporan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	100%							
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	581 Orang/ Bulan	290 Orang	339 orang	339 orang	100	581 Orang/ Bulan	522 Orang/ Bulan	100
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	3 Dokumen	100
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	5 Laporan	20 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	8 Laporan	8 Laporan	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%							
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	100%							
3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	11 Orang	2 Orang	0	0	3 Orang	0	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jgnis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana	100%	5	6	7	8	9	10	11
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	0	0	0	12 Paket	12 Paket	100
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	16 Dokumen	2 Dokumen	12,5
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	400 Laporan	250 Laporan	340 Laporan	100	140 Laporan	895 laporan	100
3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%							
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	1 unit	1 unit	100	0	0	0
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana	100%							
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%							
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	1 unit	1 unit	100	0	0	0
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana	100%							
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%							
3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100	22 Unit	22 Unit	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	90 Unit	50 unit	50 unit	100	50 unit	50 unit	100
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	3 Unit	0	0	1 Unit	0	0
3.28.03	PENGLOLAAN HUTAN	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	1,86%							
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan kawasan hutan	1 Dokumen							
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	5 Dokumen	100
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase KPH yang telah menyusun RPHJP	100%							
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	18 Dokumen	0	0	0	0	4 Dokumen	4 Dokumen	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah dokumen pembinaan izin berusaha dan realisasi PNPB	2 Dokumen							
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	8 Dokumen	100
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	100
3.28.03.1.03.xxxx	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Peningkatan Sarana Prasarana Jasa Lingkungan	0	1 lokasi	0	0	0	0	0	0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	0,14%							
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	26 Ha	24,434 Ha	40 Ha	42,98 Ha	100	26 Ha	29,225 Ha	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan /atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	200 Laporan	12 Laporan	83 laporan	156 laporan	100	8 laporan	236 laporan	100
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	7 Ha	0	0	0	0	7 Ha	7 Ha	100
3.28.03.1.04.xxxx	Penerapan Teknis Konservasi Tanah dan Air Hutan da Lahan	Jumlah bangunan Sipil Teknis yang terbangun	0	0	17 unit	0	0	0	0	0
3.28.03.1.04.xxxx	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas areal perapan pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan	0	0	160 Unit	0	0	0	0	0
3.28.03.1.04.xxxx	Pembangunan Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	0	0	0	0	0	5 unit	0	0
3.28.03.1.04.xxxx	Pembangunan Gully Plug	Jumlah Gully Plug yang terbangun	0	0	0	0	0	6 unit	0	0
3.28.03.1.04.xxxx	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	0	0	0	0	0	6 unit	0	0
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	0,367%							
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100	15 Laporan	469 Laporan	100
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	300 Ha	280 Ha	300 Ha	470,86 Ha	100	200 Ha	253 Ha	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Nilai produksi hasil hutan kayu	Rp.3.177.000.000							
3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	15 Laporan	0	0	0	0	15 Laporan	18 Laporan	100
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	0,14%							
3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	3 Unit Usaha	0	0	0	0	0	0	0
3.28.03.1.09.xxxx	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	0	0	0	0	0	2 laporan	3 laporan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.28.03.1.09.xxxx	Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan /atau Bibit Terdaftar	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	0	0	2 unit usaha	2 unit usaha	100	0	0	0
3.28.04	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Keanekaragaman Hayati	3,092							
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	0,471							
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan	60 Orang (2 kelompok)	2 kelompok	40 orang	40 orang	100	40 orang	40 orang	100
3.28.05	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	8%;4%							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase KTH yang dibina dan difasilitasi	100%							
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	28 Kelompok	118 KTH	42 Kelompok	92 Kelompok	100	45 Kelompok	225 Kelompok	100
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	54 orang	20 Orang	8 Orang	40	30 orang	41 orang	100
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	4423 Ha	5000 Hektar	5081,57 Hektar	100	5000 Hektar	4706 Hektar	94
3.28.06	PENGLOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	1,69%							
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	0,14%							
3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	9 lokasi(9 Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan data sebagai berikut:

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - 1.1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi pada dengan target 3 orang dan belum dapat direalisasikan.
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ditargetkan bagi 581 orang ASN dan terealisasi sebanyak 522 orang.
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Dari target sebanyak 16 dokumen, realisasi yang dicapai hanya sebanyak 2 dokumen.
 - 2). Program Pengelolaan Hutan
 - 2.1. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada Subkegiatan Pembangunan Sumur Resapan pada belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.
 - 2.2. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada Subkegiatan Pembangunan Gully Plug belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.
 - 2.3. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada Subkegiatan Pembangunan Dam Penahan belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.
 - 3). Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

- 3.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada Subkegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan seluas 5000 hektar dan hanya terealisasi 4.076 hektar.
2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi pada Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada dengan target 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen.
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen.
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan target 8 dokumen dan terealisasi 8 dokumen.
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
 - 1.5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan target 12 dokumen dan terealisasi 12 dokumen.
 - 1.6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada dengan target 1 paket dan terealisasi 1 paket.

- 1.7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 1 paket dan terealisasi 1 paket.
- 1.8. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan target 1 paket dan terealisasi 1 paket.
- 1.9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target 2 paket dan terealisasi 2 paket.
- 1.10. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan target 1 paket dan terealisasi 1 paket.
- 1.11. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada dengan target 12 laporan dan terealisasi 12 laporan.
- 1.12. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
- 1.13. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target 1 unit dan terealisasi 1 unit.
- 1.14. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 12 laporan dan terealisasi 12 laporan.
- 1.15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 12 laporan dan terealisasi 12 laporan.
- 1.16. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 12 laporan dan terealisasi 12 laporan.

- 1.17. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dengan target 22 unit dan terealisasi 22 unit.
- 1.18. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 50 unit dan terealisasi 50 unit.
2. Program Pengelolaan Hutan
 - 2.1 Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) pada Subkegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan target 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen.
 - 2.2. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Subkegiatan Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan dengan target 7 hektar dan terealisasi 7 hektar.
 - 2.3. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada Subkegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
3. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - 3.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada Subkegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
4. Program Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
 - 4.1. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada Subkegiatan

Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi dengan target 40 orang dan terealisasi 40 orang.

3. Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 10 laporan dan terealisasi 13 laporan.

1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 140 laporan dan terealisasi 895 laporan.

2). Program Pengelolaan Hutan

2.1. Kegiatan Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi pada Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan dengan target 2 dokumen dan terealisasi 5 dokumen.

2.2. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi dengan target 2 dokumen dan terealisasi 8 dokumen.

2.3. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi dengan target 2 dokumen dan terealisasi 4 dokumen.

2.4. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m³/Tahun pada

- Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan PBPHH skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi dengan target 15 laporan dan terealisasi 18 laporan.
- 2.5. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada Subkegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara dengan target 26 hektar dan terealisasi 29,225 hektar.
 - 2.6. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada Subkegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan dengan target 8 laporan dan terealisasi 236 laporan.
 - 2.7. Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan pada Subkegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit dengan target 2 laporan dan terealisasi 3 laporan.
 - 2.8. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Subkegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan dengan target 200 hektar dan terealisasi 253 hektar.
 - 2.9. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan target 15 laporan dan terealisasi 469 laporan.
- 3). Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan.
- 3.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada Subkegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM dengan target 30 orang dan terealisasi 41 orang.

3.2. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada Subkegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan pada dengan target 45 kelompok dan terealisasi 225 kelompok.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan, yaitu:

1. Belum ada penjadwalan pelaksanaan DIKLAT PIM dan alokasi peserta DIKLAT PIM dari BP2SDM Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, anggaran yang telah dialokasikan bersifat spesifik dan tidak dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan lain, sehingga realisasi subkegiatan tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.
2. Adanya Dinamika kepegawaian selama tahun berjalan, seperti pensiun, mutasi keluar, serta jabatan yang belum terisi.
3. Keterbatasan ketersediaan bahan bacaan untuk Penyuluh Kehutanan dan terkendala dalam proses tata waktu pengadaan (E-purchasing), sehingga pengadaan dokumen sesuai kebutuhan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
4. Dokumen RKP Perubahan DBH Sawit belum disahkan sesuai Berita Acara Pembahasan RKP tanggal 27 Oktober 2025 sehingga subkegiatan fisik yang bersumber dari dana DBH Sawit belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025.
5. Masyarakat belum sepenuhnya memahami informasi Perhutanan Sosial.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu

1. Pelaksanaan Program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen Renja sebagai turunan dari Dokumen Renstra.
2. Koordinasi antar bidang pada dinas dalam melaksanakan program/kegiatan.

3. Sinergitas program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
 1. Realisasi kinerja program dan kegiatan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam Renja sebagai turunan Renstra Perangkat Daerah akan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tahunan Perangkat Daerah, tertundanya pelaksanaan sebagian kegiatan berdampak pada belum tercapainya outcome yang direncanakan pada tahun berjalan, berpotensi mengganggu kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra., meningkatnya risiko ketidaktercapaian target akhir Renstra apabila tidak dilakukan penyesuaian strategi dan percepatan pelaksanaan dan menurunnya efektivitas pemanfaatan anggaran dan sumber daya pendukung akibat kegiatan yang tidak terlaksana atau tidak optimal.
 2. Target kinerja program dan kegiatan pada tahun berjalan telah tercapai sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renja sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah akan berdampak pada pencapaian sasaran tahunan Perangkat Daerah dikarenakan outcome program dan kegiatan dapat direalisasikan pada tahun berjalan sehingga pelaksanaan program dinilai efektif dan keberlanjutan program serta peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah:
 1. Koordinasi dengan BP2SDM Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyelenggara Diklat ASN.
 2. Perbaikan Manajemen dan Tata kelola waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 3. Dinas Kehutanan memfasilitasi usulan perhutanan sosial untuk diverifikasi teknis oleh Kementerian Kehutanan

hingga diterbitkan Surat persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

4. Dinas Kehutanan Sumsel proaktif melalui penyuluh di KPH memberikan sosialisasi, pendampingan/ pembinaan dan pemberian bantuan alat ekonomi produktif untuk meningkatkan produktivitas usahanya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan pelayanan Dinas Kehutanan terletak pada capaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan terhadap Indikator kinerja yang dicapai pada tahun 2024 dan 2025. Pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdapat perubahan indikator kinerja dibandingkan dengan Renstra Tahun 2024-2026. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, penyelarasan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, serta untuk meningkatkan keterukuran dan relevansi indikator terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pada Renstra Tahun 2025–2029, beberapa indikator mengalami penyesuaian baik dari sisi nomenklatur, definisi operasional, maupun target kinerja, guna memastikan indikator lebih mencerminkan outcome yang diharapkan serta mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Selain itu, perubahan indikator juga dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan aktual pembangunan daerah.

Dengan adanya perubahan tersebut, diharapkan pengukuran kinerja perangkat daerah pada periode Renstra Tahun 2025–2029 dapat dilakukan secara lebih akurat, efektif, dan akuntabel, serta selaras dengan prinsip perencanaan berbasis kinerja. Adapun Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan disajikan pada Tabel T-C.30 dibawah ini.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya (Rp)	-	-	73,795,118,040	77,484,874,860	-	-	90.230.748.857,11	109,981,335,177.16	-	-	-
2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	-	-	36	61	-	-	171	261	-	-	-
3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	-	-	10.51	12.19	-	-	36,75	28,84	-	-	-
4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	-	-	10	10	-	-	130,08	512,44	-	-	-
5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	-	-	0.14	0.14	-	-	0,22	0,17	-	-	-
6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	-	-	140	175	-	-	165	209	-	-	-
7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	-	-	100	100	-	-	95,45	93,07	-	-	-
8	Persentase tutupan lahan (%)	-	-	-	18,8	19,10	19,4	-	18,8	19,10	19,4	-
9	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	-	-	0.25	0.27	0.29	-	0,91	0.27	0.29	-
10	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	-	-	-	1,63	1,86	2,09	-	3,89	1,86	2,09	-
11	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	-	-	6	8	9	-	12,82	8	9	-
12	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	-	-	3	4	5	-	4.630	4	5	-
13	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	-	-	-	39,1	42,09	44,56	-	29.360	42,09	44,56	-

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	-	-	-	0,408	0,367	0,333	-	0.214	0,367	0,333	-
15	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	-	-	-	0,568	0,615	0,669	-	0.681	0,615	0,669	-
16	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	-	-	-	3,092	3,092	3,092	-	3.092	3,092	3,092	-
17	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	-	-	-	0.13	0.14	0.15	-	0,46	0.14	0.15	-
18	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	-	-	-	1.68	1.69	1.70	-	2,56	1.69	1.70	-
19	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Angka/Huruf)	-	-	-	85/A	86/A	87/A	-	80,72	86/A	87/A	-

Secara keseluruhan, kinerja pembangunan sektor kehutanan menunjukkan hasil yang sangat positif, terutama pada aspek pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan lingkungan. Namun demikian, terdapat indikator strategis seperti akses legal perhutanan sosial, masih memerlukan perbaikan kebijakan, penyesuaian indikator, serta penguatan implementasi program ke depan. Adapun kajian terhadap capaian kinerja indikator pada tahun 2024 dan 2025 berdasarkan tabel di atas sebagai berikut:

1. Jumlah Pembayaran PNBPN sesuai Kewajibannya

Pada Tahun 2024, realisasi pembayaran PNBPN tercatat telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif baik. Namun pada Tahun 2025, realisasi belum sepenuhnya mencapai target Renstra, yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktivitas usaha kehutanan dan dinamika regulasi.

2. Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove

Pada Tahun 2024, realisasi patroli pengamanan relatif sejalan dengan target, mencerminkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan lapangan. Pada Tahun 2025, realisasi mengalami penurunan dibandingkan target akibat keterbatasan SDM dan sarana pendukung.

3. Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pengamanan

Realisasi Tahun 2024 belum sepenuhnya mencapai target karena luas wilayah dan keterbatasan akses. Pada Tahun 2025, terdapat peningkatan realisasi meskipun masih berada di bawah target Renstra.

4. Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan yang Ditangani

Pada Tahun 2024, realisasi penanganan lahan kritis relatif tinggi dan mendekati target yang ditetapkan. Tahun 2025 menunjukkan capaian yang stabil, meskipun masih terdapat selisih dengan target akibat keterbatasan anggaran.

5. Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi
 Realisasi Tahun 2024 masih di bawah target Renstra karena kendala kesiapan lahan dan faktor cuaca. Pada Tahun 2025, capaian mengalami peningkatan namun belum optimal.
6. Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pembinaan.
 Pada Tahun 2024, realisasi pembinaan kelompok perhutanan sosial telah memenuhi target. Tahun 2025 menunjukkan peningkatan jumlah kelompok yang dibina, meskipun belum sepenuhnya sebanding dengan target Renstra.
7. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah
 Realisasi Tahun 2024 berada pada kategori baik meskipun belum mencapai target maksimal. Pada Tahun 2025, capaian meningkat seiring perbaikan sistem layanan internal.
8. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 Indikator ini menunjukkan capaian yang sangat tinggi, yaitu 364% dari target. Realisasi sebesar 0,91% jauh melampaui target 0,25%, yang mengindikasikan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah berjalan sangat baik. Capaian ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor primer, termasuk kehutanan dan perikanan.
8. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB
 Dengan capaian 238,7%, indikator ini memperlihatkan bahwa sektor kehutanan memberikan kontribusi yang signifikan dan melampaui ekspektasi. Hal ini mencerminkan meningkatnya nilai tambah sektor kehutanan, baik dari produksi hasil hutan maupun kegiatan ekonomi turunan.
9. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)
 Capaian sebesar 213,7% menunjukkan keberhasilan program pembinaan dan pemberdayaan KTH. Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH menandakan bahwa intervensi pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan masyarakat berjalan efektif.

10. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

Indikator ini mencapai 154,3%, menandakan adanya peningkatan kualitas usaha KUPS. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan usaha, akses pasar, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat perhutanan sosial mulai memberikan dampak positif.

10. Peningkatan Akses Legal Masyarakat melalui Perhutanan Sosial

Capaian indikator ini baru mencapai 75,3% dan belum memenuhi target. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya keterbatasan usulan dari kelompok masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi Perhutanan Sosial.

11. Persentase Kerusakan Hutan per Tahun (Deforestasi)

Realisasi deforestasi sebesar 0,214% lebih rendah dari target 0,408%, dengan capaian 52,5%. Walaupun secara substansi kondisi ini menunjukkan penurunan laju kerusakan hutan, secara perhitungan kinerja indikator belum memenuhi target karena indikator ini bersifat semakin kecil semakin baik, sehingga perlu penyesuaian dalam metode penilaian kinerja.

12. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah

Indikator ini mencapai 119,9%, menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan kawasan bernilai ekologis penting.

13. Indeks Keanekaragaman Hayati

Capaian indikator ini tepat 100%, yang berarti target telah tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan stabilitas kondisi keanekaragaman hayati daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

14. Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi

Dengan capaian sangat tinggi sebesar 353,8%, indikator ini menunjukkan keberhasilan signifikan dalam kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan. Hal ini mengindikasikan adanya

percepatan pelaksanaan rehabilitasi serta dukungan program lintas sektor.

15. Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai
Capaian 152,4% menunjukkan peningkatan tutupan vegetasi pada sempadan sungai yang melampaui target. Kondisi ini berdampak positif terhadap fungsi perlindungan lingkungan, pengendalian erosi, dan kualitas ekosistem sungai.
16. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah
Capaian sebesar 93,07% menunjukkan bahwa sebagian besar layanan telah terpenuhi, namun masih terdapat kekurangan dibandingkan target 100%. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas tata kelola, efektivitas layanan, dan dukungan sumber daya.
17. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Dengan capaian sekitar 95% dari target nilai A, indikator ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja agar nilai akuntabilitas dapat meningkat secara optimal.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Kehutanan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan memiliki tanggung jawab strategis dalam mewujudkan kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan dihadapkan dengan tantangan, permasalahan dan hambatan pembangunan, sehingga perlu menjalin kerjasama, koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah provinsi.

2.3.1. Uraian mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan pencapaian tujuan pembangunan sektor kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi secara berkelanjutan melaksanakan koordinasi dan sinergi program dengan perangkat daerah provinsi lainnya. Koordinasi ini menjadi faktor kunci dalam mendukung capaian indikator kinerja sektor kehutanan yang sebagian besar telah melampaui target, sekaligus dalam mengatasi berbagai isu strategis dan keterbatasan pelayanan.

Sinergi program dilaksanakan melalui penyelarasan perencanaan dan penganggaran antar perangkat daerah, khususnya dalam mendukung kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan kelembagaan masyarakat, serta perlindungan lingkungan hidup. Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pertanian, pemberdayaan masyarakat, serta penanaman modal, guna memastikan keterkaitan program kehutanan dengan prioritas pembangunan daerah.

Dalam mendukung peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi daerah, koordinasi dilakukan dengan perangkat daerah yang membidangi ekonomi dan pertanian, terutama dalam pengembangan usaha hasil hutan, peningkatan nilai tambah produk kehutanan, serta penguatan kelompok usaha berbasis perhutanan sosial. Sinergi ini mendorong peningkatan kinerja ekonomi sektor kehutanan sebagaimana tercermin pada capaian indikator PDRB yang melampaui target.

Pada aspek pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, Dinas Kehutanan menjalin koordinasi erat dengan perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dan pekerjaan umum, khususnya dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian lahan kritis, serta peningkatan tutupan lahan pada sempadan sungai. Sinergi lintas sektor ini

berkontribusi pada keberhasilan rehabilitasi lahan dan peningkatan kualitas lingkungan, yang tercermin dari tingginya capaian indikator rehabilitasi lahan kritis dan tutupan lahan.

Dalam rangka penguatan peran serta masyarakat, koordinasi dilakukan dengan perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi dan UMKM, serta sosial, khususnya dalam pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Melalui sinergi program pendampingan, pelatihan, dan pengembangan usaha, terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, sebagaimana ditunjukkan oleh capaian indikator peningkatan KTH dan KUPS.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, masih terdapat tantangan dalam koordinasi dan sinergi program, terutama pada aspek pelayanan yang melibatkan lintas kewenangan, seperti proses peningkatan akses legal masyarakat melalui Perhutanan Sosial. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme koordinasi antar perangkat daerah agar proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat waktu.

Ke depan, Dinas Kehutanan akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi program dengan perangkat daerah provinsi lainnya melalui forum perencanaan terpadu, penyusunan program bersama, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi lintas sektor. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah, mempercepat pencapaian target pembangunan sektor kehutanan, serta mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, berbagai permasalahan dan hambatan masih dihadapi sehingga memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan target kinerja yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut muncul baik

dari faktor internal organisasi maupun faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung perangkat daerah. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya penyelenggaraan program dan kegiatan, kualitas layanan publik, serta kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah dan nasional. Secara rinci permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan berbasis perizinan, yang tercermin dari rendahnya realisasi tanaman PBPH, pemanfaatan Multi Usaha Kehutanan (HHBK dan jasa lingkungan/karbon), pelaksanaan FOLU Net Sink, pemenuhan kewajiban perizinan, serta lemahnya koordinasi dan kepastian regulasi skema karbon.
2. Masih tingginya konflik tenurial dan penguasaan kawasan hutan, termasuk perambahan, alih fungsi lahan, sawit terbangun, serta belum optimalnya pendataan subjek dan objek penguasaan lahan dan pengusulan PPTPKH oleh pemerintah kabupaten/kota.
3. Belum optimalnya perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, yang berdampak pada meningkatnya interaksi negatif manusia dengan satwa liar, kejadian kebakaran hutan dan lahan, serta lemahnya penegakan hukum yang belum memberikan efek jera.
4. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana kehutanan, baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun pemerataan personil (Polhut, PEH, penyuluh), serta kondisi sarana prasarana KPH dan pendukung rehabilitasi hutan dan DAS yang belum memadai.
5. Lemahnya kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, ditandai dengan rendahnya kapasitas kelembagaan KTH/KUPS, partisipasi perempuan, keterlibatan petani hutan rakyat, akses permodalan, industri hilir, pemasaran, serta kemitraan usaha kehutanan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi hutan, lahan, dan DAS, akibat keterbatasan anggaran, rendahnya sinergi multipihak, kendala rehabilitasi pada lahan hak milik

masyarakat, keterbatasan bibit unggul bernilai ekonomi tinggi, serta minimnya dukungan SDM dan sarana prasarana.

7. Permasalahan tata kelola aset dan keuangan kehutanan daerah, meliputi belum tertibnya sertifikasi aset hasil pelimpahan kewenangan P3D serta belum optimalnya pemanfaatan dan pemutakhiran informasi penyaluran DBH Dana Reboisasi dalam mendukung perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi memberikan dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan capaian program nasional, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya PBPH, Multi Usaha Kehutanan, perhutanan sosial, akses pasar dan industri hilir menghambat peningkatan nilai tambah sektor kehutanan, sehingga kontribusinya terhadap PDRB dan penurunan kemiskinan belum maksimal.
2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup daerah dan daya dukung wilayah akibat dari Konflik tenurial, perambahan, kebakaran hutan dan lahan, serta lemahnya perlindungan keanekaragaman hayati.
3. Belum optimalnya penegakan hukum, penataan penguasaan kawasan hutan, serta ketidaktertiban pengelolaan aset dan DBH Dana Reboisasi berdampak pada rendahnya efektivitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
4. Menghambat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sebagai akibat dari lemahnya kelembagaan KTH/KUPS, rendahnya partisipasi perempuan, serta keterbatasan akses permodalan dan kemitraan sehingga manfaat pembangunan kehutanan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar hutan.
5. Belum optimalnya realisasi tanaman PBPH, rehabilitasi hutan dan lahan, serta koordinasi skema karbon berpotensi menghambat pencapaian target penurunan emisi sektor kehutanan pada Program FOLU Net Sink 2030.

6. Kurangnya pendampingan kelembagaan berdampak pada keterlambatan pencapaian target luasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam Program Perhutanan Sosial.
7. Keterbatasan anggaran, rendahnya sinergi multipihak, serta kendala di lahan hak milik masyarakat menghambat pencapaian target rehabilitasi lahan kritis dan pemulihan fungsi DAS.
8. Belum optimalnya pemenuhan kewajiban pemegang izin, pengelolaan aset, serta dukungan SDM kehutanan berdampak pada belum optimalnya implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah dalam rangka penguatan tata kelola kehutanan.

Permasalahan tersebut jika tidak ditangani secara sistematis dan terintegrasi, maka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta target Program Nasional berpotensi tidak optimal, baik dari sisi kinerja ekonomi, kualitas lingkungan, kesejahteraan masyarakat, maupun tata kelola pemerintahan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan, sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah dan sebaran SDM kehutanan serta kompetensi teknis termasuk penyuluh dan Polhut, belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah kelola dan kompleksitas permasalahan kehutanan.
2. Keterbatasan dukungan anggaran serta ketersediaan sarana prasarana operasional (kendaraan, peralatan lapangan, teknologi pendukung) masih terbatas, khususnya untuk wilayah dengan akses sulit.
3. Luas dan Karakteristik Wilayah Kelola yang luas, tersebar dan beragam topografi menjadi tantangan dalam pengawasan, pelayanan perizinan, serta pembinaan masyarakat sekitar hutan.

4. Masih adanya perambahan, konflik tenurial, kebakaran hutan dan lahan, serta aktivitas ilegal lainnya yang memerlukan penanganan lintas sektor dan berkelanjutan.
5. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal dalam hal sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya masih perlu diperkuat.

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan, sebagai berikut:

1. Dukungan Kebijakan Nasional dan Daerah.
Adanya kebijakan strategis seperti perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, serta multiusaha kehutanan membuka ruang peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan
Pengembangan sistem informasi kehutanan, pemantauan berbasis spasial, dan digitalisasi pelayanan perizinan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan.
3. Potensi Pengembangan Multi Usaha Kehutanan
Optimalisasi hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan ekowisata dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pendanaan alternatif sektor kehutanan.
4. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Lembaga Non-Pemerintah
Kerja sama dengan swasta, akademisi, dan LSM membuka peluang inovasi, transfer pengetahuan, serta dukungan pembiayaan dan pendampingan teknis

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1. Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Berbasis Perizinan.
2. Percepatan Penanganan Konflik Tenurial Dan Penguasaan Kawasan Hutan.

3. Penguatan Perlindungan Hutan Dan Keanekaragaman Hayati.
4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Kehutanan.
5. Penguatan Kelembagaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan.
6. Optimalisasi Rehabilitasi Hutan, Lahan dan DAS.
7. Perbaikan Tata Kelola Aset Dan Keuangan Perangkat Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja Dinas Kehutanan Tahun 2026 disusun dengan memuat 5 program, 18 kegiatan, dan 42 subkegiatan sebagai kerangka awal pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Seiring dengan proses pembahasan dan penetapan RKPD Tahun 2026, dilakukan penajaman perencanaan melalui penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah serta kebijakan pengendalian belanja.

Perbedaan yang muncul antara Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan terutama terdapat pada penajaman indikator kinerja, penyesuaian target, serta pagu indikatif. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan didasari oleh adanya dana transfer ke daerah yang mengalami penurunan, efisiensi anggaran, adanya penyesuaian dan rasionalisasi pada beberapa anggaran belanja (belanja listrik, air dan internet serta anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN).

Hasil penetapan RKPD menunjukkan adanya perubahan komposisi kegiatan dan subkegiatan, di mana Renja Dinas Kehutanan Tahun 2026 ditetapkan menjadi 5 program, 17 kegiatan, dan 35 subkegiatan. Perubahan tersebut disebabkan oleh adanya 7 subkegiatan semula tercantum di dalam rancangan awal RKPD tahun 2026 setelah penetapan RKPD mengalami efisiensi anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.

Efisiensi anggaran ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian antara kebutuhan program dengan kapasitas fiskal daerah, serta untuk memastikan belanja daerah lebih difokuskan pada kegiatan prioritas yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan kinerja

perangkat daerah. Meskipun terjadi pengurangan jumlah subkegiatan, arah kebijakan, tujuan program, dan sasaran kinerja Dinas Kehutanan tetap terjaga dan tidak mengalami perubahan substantif.

Dengan demikian, penyesuaian antara rancangan awal Renja dan Renja yang ditetapkan melalui RKPD merupakan bagian dari proses penyempurnaan perencanaan, guna menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih realistis, efisien, dan implementatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 secara rinci disajikan pada Tabel T-C.31 di bawah ini.

Tabel T-C.31.
 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
 Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Lembar 1 dari 12

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KEHUTANAN				81,179,600.210	KEHUTANAN				70,138,272.767	
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat; Akuntabilitas Kinerja PD Daerah	100%; 86/A	72,483,877.710	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat; Akuntabilitas Kinerja PD Daerah	100%; 86/A	64,991,272.767	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun	100%	485,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun	100%	170,000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	110,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	80,000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	175,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	90,000	
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dina	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen	100,000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	0	
1.5	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendukung Statistik Daerah Hasil Walidata Sektoral	5 Laporan	100,000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendukung Statistik Daerah Hasil Walidata Sektoral	0	0	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	100%	66,015,801	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	100%	60,662,100	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	581 Orang/ Bulan	65,555,801	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	581 Orang/ Bulan	60,282,099.894	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	340,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	300,000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	5 Laporan	120,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	5 Laporan	80,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%	125,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%	30,000	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	125,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	30,000	
3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	100%	120,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	100%	86,000	
4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	
4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	
4.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	50,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	50,000	
4.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	70,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	36,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Iindikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Iindikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana	100%	2,021,231	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana	100%	937,000	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,000	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	564,231.128	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60,000	
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	150,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	150,000	
5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75,000	
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12,000	
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamuk	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuk	12 Laporan	100,000	Fasilitasi Kunjungan Tamuk	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuk	0	0	
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	580,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	
5.1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%	535,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%	35,000	
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	
6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	535,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35,000	
6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana	100%	2,181,846	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana	100%	2,361,173	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20,000	

No.	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	587,426	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	546,153	
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,574,420	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,795,020	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%	1,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%	710,000	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	700,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	470,000	
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	150,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	90,000	
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000	
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Iindikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Iindikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	PENGLOLAAN HUTAN	Dinas dan UPTD KPH	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	1,86%	5,370,723	PENGLOLAAN HUTAN	Dinas dan UPTD KPH	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	1,86%	1,972,000	
1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah dokumen peyelesaian permasalahan kawasan hutan	1 Dokumen	75,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah dokumen peyelesaian permasalahan kawasan hutan	1 Dokumen	60,000	
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	75,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	60,000	
1.2	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	0	0	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	0	0	
1.3	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	0	0	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	0	0	
2	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Dinas dan UPTD KPH	Persentase KPH yang telah menyusun RPHJP	100%	650,000	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	Persentase KPH yang telah menyusun RPHJP	0	0	
2.1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	18 Dokumen	650,000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	0	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah dokumen pembinaan izin berusaha dan realisasi PNPB	2 Dokumen	280,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah dokumen pembinaan izin berusaha dan realisasi PNPB	2 Dokumen	210,000	
3.1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	130,000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	100,000	
3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	150,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	110,000	
4	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	0,14%	2,135,723	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	0,14%	610,000	
4.1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	180,000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	80,000	
4.2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	
4.3	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Dinas dan UPTD KPH	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	26 Ha	830,723	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Dinas dan UPTD KPH	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	26 Ha	450,000	Mendukung Program Prioritas Gubernur

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.4	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	200 Laporan	925,000	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	200 Laporan	80,000	
4.5	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Dinas dan UPTD KPH	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	7 Ha	200,000	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	-	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	0	0	
4.6	Pembangunan Sumur Resapan	-	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	0	0	Pembangunan Sumur Resapan	-	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	0	0	
4.7	Pembangunan Gully Plug	-	Jumlah Gully Plug yang terbangun	0	0	Pembangunan Gully Plug	-	Jumlah Gully Plug yang terbangun	0	0	
4.8	Pembangunan Dam Penahan	-	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	0	0	Pembangunan Dam Penahan	-	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	0	0	
5	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Dinas dan UPTD KPH	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	0,367%	1,980,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Dinas dan UPTD KPH	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	0,367%	1,032,000	
5.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0	0	
5.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	15 Laporan	1,610,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	15 Laporan	900,000	
5.3	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Dinas dan UPTD KPH	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	300 Ha	370,000	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Dinas dan UPTD KPH	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	300 Ha	132,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000	Dinas dan UPTD KPH	Nilai produksi hasil hutan kayu	Rp.3.177.000.000	150,000	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000	-	Nilai produksi hasil hutan kayu	0	0	
6.1	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Dinas dan UPTD KPH	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	15 Laporan	150,000	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	-	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	0	0	
7	Perbenihan Tanaman Hutan	Dinas dan UPTD KPH	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	0,14%	100,000	Perbenihan Tanaman Hutan	Dinas dan UPTD KPH	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	0,14%	60,000	
7.1	Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	-	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	0	0	Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	3 Unit Usaha	60,000	
7.2	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	3 unit usaha	100,000	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	-	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	0	0	

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Dinas dan UPTD KPH	Indeks Keanekaragaman Hayati	3,092	110,000	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Dinas dan UPTD KPH	Indeks Keanekaragaman Hayati	3,092	95,000	
1	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian	Dinas dan UPTD KPH	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	0,471	110,000	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian	Dinas dan UPTD KPH	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	0,471	95,000	
1.1	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan	60 Orang	110,000	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan	60 Orang	95,000	
1.2	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	-	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	0	0	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	-	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	0	0	
IV	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	8%;4%	3,165,000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	8%;4%	3,040,000	
1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Dinas dan UPTD KPH	Persentase KTH yang dibina dan difasilitasi	100%	3,165,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Dinas dan UPTD KPH	Persentase KTH yang dibina dan difasilitasi	100%	3,040,000	
1.1	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	28 Kelompok	380,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	28 Kelompok	280,000	Mendukung Program Prioritas Gubernur

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	295,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	100,000	
1.3	Penyiapan Perhutanan Sosial	Dinas dan UPTD KPH	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2,490,000	Penyiapan Perhutanan Sosial	Dinas dan UPTD KPH	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2,660,000	
1.4	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	-	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan Kualitasnya	0	0	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	-	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan Kualitasnya	0	0	
V	PENGLOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	1,69%	50,000	PENGLOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas dan UPTD KPH	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	1,69%	40,000	
1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas dan UPTD KPH	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	0,14%	50,000	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas dan UPTD KPH	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	0,14%	40,000	
1.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	0	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	0	0	
1.2	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	-	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	0	0	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	-	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	0	0	
1.3	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	50,000	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Dinas dan UPTD KPH	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	40,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Belanja Alat Ekonomi Produktif yang diserahkan kepada masyarakat (LPHD/KTH/PBPH) Perhutanan Sosial merupakan usulan yang disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rapat kerja bersama DPRD dan Dinas Kehutanan mengenai peran perangkat daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Dukungan belanja berupa alat ekonomi produktif yang diserahkan kepada masyarakat atau KTH merupakan bagian dari Subkegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, karena berfungsi sebagai stimulus bagi masyarakat dalam mempercepat perluasan akses kelola masyarakat terhadap kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial, sekaligus mendorong pemanfaatan kawasan secara legal, produktif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, usulan program dan kegiatan ini dinilai relevan dan strategis karena telah selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan, mendukung prioritas pembangunan daerah, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari di Provinsi Sumatera Selatan

Usulan program/kegiatan pemangku kepentingan pada Dinas Kehutanan Tahun 2026 disajikan dalam Tabel T-C.32 di bawah ini.

Tabel T-C. 32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan

No	Program/Kegiatan/Subk egiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Provinsi Sumatera Selatan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	8%;4%	
1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Provinsi Sumatera Selatan	Persentase KTH yang dibina dan difasilitasi	100%	
1.1	Penyiapan Perhutanan Sosial	Provinsi Sumatera Selatan	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 hektar	Belanja Alat Ekonomi Produktif yang diserahkan kepada masyarakat /KTH

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 mengusung tema “*Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif*”, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan domestik guna menjawab tantangan global sekaligus memastikan pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Tema ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan nasional.

Dalam konteks tugas dan fungsi Dinas Kehutanan, tema dan prioritas RKP 2026 memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Pengelolaan hutan yang lestari berperan strategis dalam mendukung kedaulatan pangan melalui penyediaan jasa lingkungan, perlindungan daerah aliran sungai, serta pengembangan sistem agroforestri dan Perhutanan Sosial yang menopang ketahanan pangan masyarakat sekitar hutan. Selain itu, sektor kehutanan juga berkontribusi terhadap kedaulatan energi melalui pemanfaatan biomassa dan sumber energi terbarukan berbasis hutan secara berkelanjutan.

Prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 yang menekankan peningkatan produktivitas ekonomi melalui hilirisasi dan penguatan daya saing selaras dengan peran Dinas Kehutanan dalam mendorong pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pengembangan usaha Perhutanan Sosial, serta peningkatan nilai tambah produk kehutanan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi yang berbasis pada potensi lokal dan ramah lingkungan.

Selanjutnya, penekanan pada inklusivitas pembangunan agar tidak ada warga yang tertinggal sejalan dengan mandat Dinas Kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Melalui penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), sektor kehutanan menjadi instrumen penting dalam pemerataan manfaat pembangunan, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dalam pengelolaan hutan, pemanfaatan sumber daya kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan merupakan bagian integral dari upaya pencapaian tema dan prioritas RKP 2026. Sinergi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan pembangunan sektor kehutanan di daerah menjadi kunci untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, sekaligus mendorong ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah mewujudkan kelestarian hutan yang berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Tujuan ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam menjaga keseimbangan fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis hutan melalui pengelolaan yang terencana, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil hutan, peningkatan produktivitas kawasan, serta integrasi potensi sumber daya hutan dengan pengembangan ekonomi lokal dan penguatan investasi hijau. Dengan pendekatan ini, sektor kehutanan diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
2. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai pelaku utama pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Sasaran ini

diwujudkan melalui fasilitasi pelatihan, pendampingan teknis, serta peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan KTH.

3. Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Upaya ini diarahkan pada peningkatan akses pembiayaan, pengembangan pemasaran, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan jejaring usaha yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.
4. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga fungsi ekologis hutan. Sasaran ini dilaksanakan melalui konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian kerusakan lingkungan, serta penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari yang adaptif terhadap perubahan iklim.
5. Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga. Hal ini dilakukan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penanaman vegetasi penyangga, serta penguatan kolaborasi multipihak dalam rangka mengembalikan fungsi ekologis daerah aliran sungai.
6. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan, reformasi birokrasi, dan penerapan sistem pemerintahan berbasis kinerja. Upaya ini mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Pencapaian tujuan dan sasaran Renja Tahun 2026 diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase tutupan lahan sebesar 19,1%.

2. Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,27%.
3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB sebesar 1,86%.
4. Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi) sebesar 0,367%.
5. Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah sebesar 0,615.
6. Indeks keanekaragaman hayati sebesar 3,092.
7. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi sebesar 0,14%.
8. Persentase tutupan lahan pada sempadan sungai sebesar 1,69%.
9. Peningkatan akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial sebesar 42,09%.
10. Persentase peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebesar 8%.
11. Persentase peningkatan kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebesar 4%.
12. Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah sebesar 100%.
13. Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar 86 (predikat A).

Seluruh indikator tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 sekaligus sebagai instrumen pengendalian kinerja untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan kehutanan berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan serta masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah dilaksanakan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, guna menjamin keterpaduan, efektivitas, serta keselarasan dengan arah pembangunan daerah dan nasional. Adapun faktor-faktor yang

menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja tahun sebelumnya berupa hasil evaluasi terhadap tingkat pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan, program yang belum mencapai target dianalisis penyebabnya untuk dilakukan perbaikan pada periode perencanaan berikutnya, sedangkan program yang telah mencapai atau melampaui target diarahkan untuk peningkatan kualitas dan keberlanjutan dampaknya.
2. Identifikasi permasalahan dan isu strategis aktual yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang baik di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini dimaksudkan agar program dan kegiatan yang dirumuskan mampu menjawab akar permasalahan dan memberikan solusi yang tepat sasaran.
3. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan nasional yang relevan. Penyelarasan ini penting untuk memastikan kontribusi Perangkat Daerah terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
4. Ketersediaan dan kemampuan pendanaan daerah dengan mempertimbangkan pagu indikatif dan kapasitas fiskal daerah dan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, serta prioritas pada program strategis dan pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan urusan pemerintahan: Penyusunan program harus sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan serta regulasi teknis sektoral yang berlaku, guna memastikan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih kewenangan.
6. Kebutuhan dan aspirasi masyarakat berupa usulan pemangku kepentingan, serta kebutuhan riil masyarakat sebagai

penerima manfaat layanan. Dengan demikian, perencanaan yang disusun bersifat partisipatif dan responsif.

7. Pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta kapasitas kelembagaan menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas program, sehingga pembangunan dapat diarahkan pada penguatan keunggulan daerah secara berkelanjutan.

Hasil penetapan RKPD Tahun 2026, Renja Dinas Kehutanan melaksanakan 5 program, 17 kegiatan dan 35 subkegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp.70.138.272.767,- yang bersumber dari Dana APBD, DBH DR dan DBH Sawit dengan lokasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan di wilayah kerja dan pengelolaan UPTD KPH, lahan masyarakat, lahan di luar kawasan hutan, areal izin berusaha pemanfaatan hutan, kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, lahan kritis di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2026 disajikan dalam Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
Lembar: 1 dari 11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				70,138,272,767				
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				70,138,272,767				93,919,394,239
3.28.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat; Akuntabilitas Kinerja PD Daerah	Provinsi Sumatera Selatan	100%; 86/A	64,991,272,767	PAD		100%; 87/A	86,071,554,239
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun	Provinsi Sumatera Selatan	100%	170,000,000	PAD		100%	760,000,000
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	80,000,000	PAD		2 Dokumen	200,000,000
3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Sumatera Selatan	8 Laporan	90,000,000	PAD		14 Laporan	210,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		8 Laporan	150,000,000
3.28.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		1 Dokumen	100,000,000
3.28.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendukung Statistik Daerah Hasil Walidata Sektoral	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		5 Laporan	100,000,000
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	Provinsi Sumatera Selatan	100%	60,662,099,894	PAD		100%	73,600,634,239
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Sumatera Selatan	581 Orang/ Bulan	60,282,099,894	PAD		497 Orang/Bulan	73,060,634,239
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	300,000,000	PAD		3 Dokumen	340,000,000
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Provinsi Sumatera Selatan	5 Laporan	80,000,000	PAD		12 Laporan	200,000,000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Provinsi Sumatera Selatan	100%	30,000,000	PAD		100%	305,000,000
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		1 Dokumen	100,000,000
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	30,000,000	PAD		1 Dokumen	105,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		1 Laporan	100,000,000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	Provinsi Sumatera Selatan	100%	86,000,000	PAD		100%	1,031,000,000
3.28.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Provinsi Sumatera Selatan	0.00	0	PAD		468 Unit	351,000,000
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi Sumatera Selatan	0.00	0	PAD		455 Paket	455,000,000
3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi Sumatera Selatan	12 Dokumen	50,000,000	PAD		12 Dokumen	75,000,000
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Sumatera Selatan	2 Orang	36,000,000	PAD		2 Orang	150,000,000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana	Provinsi Sumatera Selatan	100%	937,000,000	PAD		100%	2,596,000,000
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	60,000,000	PAD		1 Paket	120,000,000
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	0	PAD		1 Paket	170,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	60,000,000	PAD		1 Paket	110,000,000
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	2 Paket	150,000,000	PAD		2 Paket	190,000,000
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	75,000,000	PAD		1 Paket	150,000,000
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	12,000,000	PAD		2 Dokumen	12,000,000
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Sumatera Selatan	12 Laporan	0	PAD		12 Laporan	150,000,000
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sumatera Selatan	100 Laporan	580,000,000	PAD		200 Laporan	1,500,000,000
3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		380 Dokumen	94,000,000
3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		1 Dokumen	100,000,000
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Provinsi Sumatera Selatan	100%	35,000,000	PAD		100%	1,100,000,000
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		20 Unit	700,000,000
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		2 Unit	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	1 Unit	35,000,000	PAD		2 Unit	50,000,000
3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	0.00	0	PAD		150 Unit	200,000,000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana	Provinsi Sumatera Selatan	100%	2,361,172,873	PAD		100%	4,653,920,000
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumatera Selatan	12 Laporan	20,000,000	PAD		12 Laporan	30,000,000
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	12 Laporan	546,152,873	PAD		12 Laporan	600,000,000
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		12 Laporan	189,000,000
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	12 Laporan	1,795,020,000	PAD		12 Laporan	3,834,920,000
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Provinsi Sumatera Selatan	100%	710,000,000	PAD		100%	2,025,000,000
3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Sumatera Selatan	22 Unit	470,000,000	PAD		38 Unit	730,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Sumatera Selatan	50 unit	90,000,000	PAD		65 Unit	195,000,000
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Sumatera Selatan	1 Unit	150,000,000	PAD		6 Unit	600,000,000
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		5 Unit	500,000,000
3.28.03	PENGLOLAAN HUTAN	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Provinsi Sumatera Selatan	1,86%	1,972,000,000	PAD		2,09%	5,278,840,000
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan kawasan hutan	Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	60,000,000	PAD		1 Dokumen	626,000,000
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	60,000,000	PAD		1 Dokumen	200,000,000
3.28.03.1.01.0005	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	Jumlah Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		1 Dokumen	300,000,000
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		140 Unit	126,000,000
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase KPH yang telah menyusun RPHJP	Provinsi Sumatera Selatan	100%	0	PAD		100%	620,000,000
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Provinsi Sumatera Selatan	18 Dokumen	0	PAD		20 Dokumen	620,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah dokumen pembinaan izin berusaha dan realisasi PNPB	Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	210,000,000	PAD		2 Dokumen	480,000,000
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	100,000,000	PAD		9 Dokumen	225,000,000
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	110,000,000	PAD		2 Dokumen	255,000,000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Provinsi Sumatera Selatan	0,14%	610,000,000	PAD		0,15%	1,300,000,000
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan	Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	80,000,000	PAD		1 Dokumen	250,000,000
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		20 Ha	300,000,000
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi Sumatera Selatan	26 Ha	450,000,000	PAD	Mendukung Program Prioritas Gubernur	10 Ha	400,000,000
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Provinsi Sumatera Selatan	200 Laporan	80,000,000	PAD		40 Laporan	150,000,000
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Provinsi Sumatera Selatan	7 Ha	0	PAD		7 Ha	200,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	Provinsi Sumatera Selatan	0,367%	1,032,000,000	PAD		0,333%	2,002,840,000
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		1 Dokumen	50,000,000
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Provinsi Sumatera Selatan	15 Laporan	900,000,000	PAD		15 Laporan	1,652,840,000
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Provinsi Sumatera Selatan	300 Ha	132,000,000	PAD		300 Ha	300,000,000
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Nilai produksi hasil hutan kayu	Provinsi Sumatera Selatan	Rp.3.177.000.000	0	PAD		Rp.3.177.000.000	150,000,000
3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Provinsi Sumatera Selatan	15 Laporan	0	PAD		15 Laporan	150,000,000
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	Provinsi Sumatera Selatan	0,14%	60,000,000	PAD		0,15%	100,000,000
3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	Provinsi Sumatera Selatan	3 Unit Usaha	60,000,000	PAD		3 Unit Usaha	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.28.03.1.09.xxxx	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		0	0
3.28.04	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Keanekaragaman Hayati	Provinsi Sumatera Selatan	3,092	95,000,000	PAD		3,092	300,000,000
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Provinsi Sumatera Selatan	0,471	95,000,000	PAD		0,471	300,000,000
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan	Provinsi Sumatera Selatan	60 Orang	95,000,000	PAD		60 Orang	200,000,000
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		200 Ha	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.28.05	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Provinsi Sumatera Selatan	8%;4%	3,040,000,000	PAD		9%;5%	1,924,000,000
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase KTH yang dibina dan difasilitasi	Provinsi Sumatera Selatan	100%	3,040,000,000	PAD		100%	1,924,000,000
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Provinsi Sumatera Selatan	28 Kelompok	280,000,000	PAD	Mendukung Program Prioritas Gubernur	121 Kelompok	815,000,000
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Provinsi Sumatera Selatan	30 Orang	100,000,000	PAD		184 Orang	609,000,000
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Provinsi Sumatera Selatan	5000 Hektar	2,660,000,000	PAD	Usulan Pemangku Kepentingan	3.000 Hektar	200,000,000
3.28.05.3.01.0005	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan Kualitasnya	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		3 Unit	300,000,000
3.28.06	PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	Provinsi Sumatera Selatan	1,69%	40,000,000	PAD		1,70%	345,000,000
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	Provinsi Sumatera Selatan	0,14%	40,000,000	PAD		0,15%	345,000,000
3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		50 Orang	75,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	PAD		2 Lembaga	150,000,000
3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	40,000,000	PAD		1 Dokumen	120,000,000

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Visi Pemerintah Provinsi Selatan, maka disusun rencana kerja Tahun 2026 yang terdiri dari 5 program, 17 kegiatan dan 35 subkegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp.70.138.272.767,- yang bersumber dari Dana APBD, DBH DR dan DBH Sawit. Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 , sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - 3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:

- 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:
 - 6.1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Pengelolaan Hutan dengan kegiatan:
 1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan:
 - 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
 2. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan sub kegiatan:
 - 2.1. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi

- 2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi
3. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara dengan sub kegiatan:
 - 3.1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
 - 3.2. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 3.3. Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan
4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan sub kegiatan:
 - 4.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
 - 4.2. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
5. Perbenihan Tanaman Hutan
 - 5.1. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perbenihan Tanaman Hutan
- III. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan kegiatan:
 1. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan sub kegiatan:
 - 1.1. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
- IV. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluh Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan dengan kegiatan:
 1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan sub kegiatan:

- 1.1. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
 - 1.2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
 - 1.3. Penyiapan Perhutanan Sosial
- V. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan kegiatan:
 - 1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan:
 - 1.1. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS

Program, kegiatan, serta sub kegiatan di atas dirumuskan dengan indikator, target, dan pendanaan agar dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran PD. Untuk lebih jelasnya, indikator, target, serta pagu indikatif tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				70,138,272,767			
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				70,138,272,767			
3.28.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat; Akuntabilitas Kinerja PD Daerah	Provinsi Sumatera Selatan	100%; 86/A	64,991,272,767	PAD		
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun	Provinsi Sumatera Selatan	100%	170,000,000	PAD		
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	80,000,000	PAD		
3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Sumatera Selatan	8 Laporan	90,000,000	PAD		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	Provinsi Sumatera Selatan	100%	60,662,099,894	PAD		
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Sumatera Selatan	581 Orang/ Bulan	60,282,099,894	PAD		
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	300,000,000	PAD		
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Provinsi Sumatera Selatan	5 Laporan	80,000,000	PAD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Provinsi Sumatera Selatan	100%	30,000,000	PAD		
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	30,000,000	PAD		
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	Provinsi Sumatera Selatan	100%	86,000,000	PAD		
3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi Sumatera Selatan	12 Dokumen	50,000,000	PAD		
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Sumatera Selatan	2 Orang	36,000,000	PAD		
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana	Provinsi Sumatera Selatan	100%	937,000,000	PAD		
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	60,000,000	PAD		
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	60,000,000	PAD		
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	2 Paket	150,000,000	PAD		
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	75,000,000	PAD		
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	12,000,000	PAD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sumatera Selatan	100 Laporan	580,000,000	PAD		
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Provinsi Sumatera Selatan	100%	35,000,000	PAD		
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	1 Unit	35,000,000	PAD		
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana	Provinsi Sumatera Selatan	100%	2,361,172,873	PAD		
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumatera Selatan	12 Laporan	20,000,000	PAD		
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	12 Laporan	546,152,873	PAD		
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Sumatera Selatan	12 Laporan	1,795,020,000	PAD		
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Provinsi Sumatera Selatan	100%	710,000,000	PAD		
3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Sumatera Selatan	22 Unit	470,000,000	PAD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Sumatera Selatan	50 unit	90,000,000	PAD		
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Sumatera Selatan	1 Unit	150,000,000	PAD		
3.28.03	PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Provinsi Sumatera Selatan	1,86%	1,972,000,000	PAD		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan kawasan hutan	Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	60,000,000	PAD		
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	60,000,000	PAD		
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah dokumen pembinaan izin berusaha dan realisasi PNPB	Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	210,000,000	PAD		
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	100,000,000	PAD		
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	110,000,000	PAD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Provinsi Sumatera Selatan	0,14%	610,000,000	PAD		
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	80,000,000	PAD		
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi Sumatera Selatan	26 Ha	450,000,000	PAD	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Provinsi Sumatera Selatan	200 Laporan	80,000,000	PAD		
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	Provinsi Sumatera Selatan	0,367%	1,032,000,000	PAD		
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Provinsi Sumatera Selatan	15 Laporan	900,000,000	PAD		
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Provinsi Sumatera Selatan	300 Ha	132,000,000	PAD		
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	Provinsi Sumatera Selatan	0,14%	60,000,000	PAD		
3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	Provinsi Sumatera Selatan	3 Unit Usaha	60,000,000	PAD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3.28.04	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Keanekaragaman Hayati	Provinsi Sumatera Selatan	3,092	95,000,000	PAD		
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Provinsi Sumatera Selatan	0,471	95,000,000	PAD		
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan	Provinsi Sumatera Selatan	60 Orang	95,000,000	PAD		
3.28.05	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Provinsi Sumatera Selatan	8%;4%	3,040,000,000	PAD		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase KTH yang dibina dan difasilitasi	Provinsi Sumatera Selatan	100%	3,040,000,000	PAD		
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Provinsi Sumatera Selatan	28 Kelompok	280,000,000	PAD		Pengentasan Kemiskinan
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Provinsi Sumatera Selatan	30 Orang	100,000,000	PAD	Gerakan SumSel Mandiri Pangan (GSMP)	Ketahanan Pangan
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Provinsi Sumatera Selatan	5000 Hektar	2,660,000,000	PAD		Pengentasan Kemiskinan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3.28.06	PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	Provinsi Sumatera Selatan	1,69%	40,000,000	PAD		
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	Provinsi Sumatera Selatan	0,14%	40,000,000	PAD		
3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	40,000,000	PAD		

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan daerah. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta sasaran pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

1. Konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program serta kegiatan agar target kinerja dapat tercapai secara optimal.
2. Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemangku kepentingan lainnya.
3. Ketersediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar pengendalian serta evaluasi kinerja pembangunan kehutanan.
4. Penguatan peran serta masyarakat, khususnya dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, perhutanan sosial, serta rehabilitasi hutan dan lahan.
5. Antisipasi terhadap dinamika kebijakan, kondisi lingkungan strategis, dan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja.

Pelaksanaan Renja Tahun 2026 berpedoman pada kaidah sebagai berikut:

1. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
2. Menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antar program dan kegiatan.
3. Menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara target dan realisasi kinerja.
5. Mengedepankan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai langkah operasional dalam memastikan implementasi Renja berjalan efektif, maka dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana aksi program dan kegiatan yang memuat target, indikator, lokasi, waktu pelaksanaan, serta penanggung jawab.
2. Pelaksanaan koordinasi teknis secara berkelanjutan dengan pemangku kepentingan untuk menjaga keterpaduan pelaksanaan program.
3. Penguatan sistem pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik.
4. Pelaksanaan reviu dan evaluasi capaian kinerja sebagai bahan penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya.
5. Pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program dan peningkatan kualitas layanan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 ini diharapkan pelaksanaan pembangunan kehutanan dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Januari 2026



KEPALA DINAS,

Drs. H. KOIMUDIN, S.H.,M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19691208 199603 1 001